

DAFTAR PUSTAKA

- [BPKP] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- [BPKD] Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2018. Kabupaten Pesisir Selatan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Pesisir Selatan dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Baharim, Samsul. 2017. Studi Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. [Skripsi]. Kendari. Universitas Halu Oleo.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- . 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Erwin. 2001. *Dinamika Pengorganisasian Jaminan Sosial dalam Keluarga pada Masyarakat Petani di Pedesaan Minangkabau*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro: Semarang.
- [http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf](http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf). diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.10 WIB.
- Kurnia, Dadang. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa"*. Jakarta: BPKP
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolang Manondow Selatan. [Skripsi]. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Manulang, M. 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 1*. Yogyakarta: BBPE.
- Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Mardiasmo. 2006. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Surabaya: STIESIA Surabaya.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mondale, dkk. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Aceh Tengah. [Jurnal]. Aceh. Universitas Syiah Kuala.

Nafidah, Lina Nasehatun. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. [Jurnal]. Jakarta. Universitas Islam Negeri Jakarta.

Nazir, M. 2009. *Metoda Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pradhana, Herybertus Yudha. 2018. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. [Skripsi]. Yogyakarta. Universitas Santa Dharma.

Simamora, Sihar. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah. [Jurnal]. Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarna, Ayi. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. [Artikel] diakses tanggal 8 Februari 2019 <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desas.html>.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.

Tijtoherijanto, Prijono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 23.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.

